

**KEBIJAKAN KERUKUNAN MULTIKULTUR
DALAM MERAJUT TOLERANSI UMAT BERAGAMA
(Studi atas Pemolisian Kasus Azan di Tanjung Balai Sumatera Utara)
Oleh: Hamdan Daulay**

Abstract

Discourse about harmony and conversation has become a long conversation in Indonesia. Harmony in the midst of multicultural in the country is an important capital to strengthen unity. The dark history of this nation collapsed in the shackles of colonialism because of the fragility of unity. The difference is that well-managed management can be beautifully dynamic, like flowers in a garden that is enhanced with a variety of colors. A scary tempest or a beautiful garden in life is a choice. However, for people who value cultural values and beauty, surely they will choose a beautiful garden, a colorful community, but supportive and full of improvement. Research on multicultural harmony policy needs to be continued because harmony will run dynamically in accordance with the development of community culture. The harmony that was disturbed in Tanjung Balai for example because of the call to prayer became an interesting discussion. The Tanjung Balai community, which during the period of being tolerant and harmonious, turned angry, was certainly interesting to discuss. A multicultural harmony policy has become a national policy that has been carried out for a long time. Although various policies have been carried out by the government through various religious dialogues, the potential for conflict always exists in the community. In the case of Tanjung Balai, social media factors that contributed to false news and hate speech became an important part

Keywords: Harmony Policy, Tolerance, Azan Case, Media, Lying News

Abstrak

Wacana tentang kerukunan dan toleransi sudah menjadi pembicaraan panjang di Indonesia. Kerukunan di tengah multikultur yang ada di tanah air menjadi modal penting penguat persatuan. Sejarah kelam bangsa ini yang terpuruk dalam belenggu penjajahan adalah karena rapuhnya persatuan. Perbedaan, manakala dikelola dengan baik akan bisa menjadi dinamika yang indah, bagaikan bunga di taman yang dihiasi dengan berbagai warna. Prahara yang menakutkan atau taman yang indah dalam kehidupan, merupakan suatu pilihan. Namun bagi masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya dan keindahan, tentulah akan memilih taman yang indah, yaitu kondisi masyarakat yang penuh warna, namun saling menghargai dan penuh toleransi. Penelitian tentang kebijakan kerukunan multikultur, perlu terus dilanjutkan, karena kerukunan akan berjalan dinamis sesuai dengan kondisi perkembangan budaya masyarakat. Kerukunan yang terusik di Tanjung Balai misalnya karena kasus azan menjadi diskusi yang menarik. Masyarakat Tanjung Balai yang selama toleran dan rukun berubah menjadi pemaarah, tentu menarik untuk diteliti. Kebijakan kerukunan multikultural

sesungguhnya sudah menjadi kebijakan nasional yang sudah dilakukan sejak lama. Walaupun berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai dialog agama secara kontiniu, namun potensi konflik selalu ada di tengah masyarakat. Dalam kasus Tanjung Balai, faktor media sosial yang ikut andil menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menjadi bagian penting pemicu munculnya kemarahan massa.

Kata Kunci: Kebijakan Kerukunan, Toleransi, Kasus Azan, Media, Berita Bohong

A. Pendahuluan

Secara historis bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang cinta damai, toleran, dan menyukai kerukunan. Karakter dasar ini menjadi ciri bangsa Indonesia karena jauh sebelum merdeka, bangsa ini telah mengenal kemajemukan, baik suku, bahasa, budaya maupun agama. Toleransi bangsa ini tampak jelas dengan melihat agama-agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, maupun Konghuchu tumbuh dan hidup berdampingan secara baik di negeri ini sejak lama. Namun, sebagai konsekuensi hidup berdampingan sesama agama-agama besar, terutama antara Muslim dan Kristen yang memiliki ciri yang sama sebagai agama misi, sesekali mereka bergesekan, berselisih, mengalami ketegangan, dan konflik kekerasan.¹

Berbicara tentang persoalan kerukunan antar umat beragama, harus ditelusuri terlebih dahulu tentang makna agama yang di dalamnya terdapat dua pengertian. Pertama, agama sebagai sebuah doktrin yang tercantum di dalam teks suci, kedua, agama sebagai bentuk aktualisasi dari doktrin tersebut yang kemudian menyebar.² Ajaran agama yang termuat dalam kitab suci bersifat ideal dan

¹ Johan Effendi, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan," dalam *PRISMA*, No. 5, Juni 1998 (Jakarta: LP3ES), 13.

² Afif Muhammad, *Radikalisme Agama-Agama Abad 21*, dalam *Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2016), 40. Nurcholish Madjid membedakan kedua pengertian agama dengan istilah "Doktrin" dan "Peradaban", misalnya agama Islam terdiri dari seperangkat ajaran ideal dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang kemudian dihimpun dalam kitab suci Al Quran. Sedangkan Islam peradaban adalah Islam yang diamalkan oleh para pemeluknya yang memiliki sifat historis, yakni pengamalan-pengamalan yang menyebar dalam kehidupan umat manusia. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992). Sementara Sayyed Hossein Nashr menggunakan istilah Islam Ideal dan Islam Realita. Lihat Sayyed Hossein Nashr, *Islam Cita dan Islam Fakta* (Jakarta: Yayasan Obor, 1984).

menghendaki para pemeluknya mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut dalam bentuknya yang paling baik, yakni sesuai dengan kehendak Sang Pemberi wahyu. Namun, dalam faktanya, seringkali para pemeluk agama tersebut menunjukkan jauhnya panggung dari api, ketika agama justru menjadi sumber konflik. Dalam hal ini, agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang memiliki wajah ganda.³ Wajah ganda tersebut terlihat, misalnya dalam doktrin-doktrin yang menyeru kepada keselamatan dan memerintahkan penganutnya mengajak orang lain menuju keselamatan dimaksud. Setiap agama, terutama agama Nasrani (Kristen dan Katolik) dan Islam memiliki kedua sisi tersebut. Pada sisi menyeru orang lain itulah lazim terjadi semangat memperebutkan atau mempertahankan umat sehingga sering muncul wajah garang dan beringas serta berujung pada konflik dan kekerasan yang membuat rusak kerukunan antara umat.

Sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik ini terkenal sangat toleran, santun, dan menghargai perbedaan yang ada. Kemauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan adalah merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat luhur. Masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya tidak akan terjebak pada konflik, karena bagi masyarakat yang berbudaya, perbedaan adalah suatu keindahan yang harus dipelihara dengan baik. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Manusia (masyarakat) dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkait. Kebudayaan tidak akan ada tanpa ada masyarakat dan tidak ada satu kelompok manusia pun, betapa terasing dan bersahajanya hidup mereka, yang tidak mempunyai kebudayaan. Semua kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan, karena manusia merupakan subyek budaya. Yang berbeda hanyalah tingkat dan taraf kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Jika dikaji, sesungguhnya ajaran masing-masing agama yang ada di Indonesia (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha) mengajarkan tentang kerukunan. Tidak satu pun agama yang mengajarkan konflik. Namun dalam praktiknya, konflik internal dan antarumat beragama terkadang tidak bisa dihindari.

³ Afif Muhammad, *Radikalisme Agama-Agama Abad ke-21*, (2016), 41.

Konflik itu bisa terjadi karena emosi umat yang tak terkendali. Untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama, perlu terus ditingkatkan pembinaan kehidupan umat beragama oleh tokoh-tokoh agama.

Ajaran tentang kerukunan sesungguhnya ada dalam setiap agama, sehingga sangat tidak pantas menyebar permusuhan dengan mengatasnamakan agama. Aktualisasi dari pembinaan umat beragama sesungguhnya sudah dilakukan dengan baik. Tokoh-tokoh agama dengan tidak mengenal lelah sudah memberi khutbah dalam rangka membina umat. Lewat pembinaan tersebut, umat beragama diharapkan bisa menjadi kelompok masyarakat yang santun, toleran serta mencintai kerukunan dan perdamaian. Umat beragama yang taat tentu tidak akan memusuhi umat agama lain, walaupun ada perbedaan di antara mereka.

Sejatinya masyarakat Indonesia yang plural selalu mendambakan kerukunan, kedamaian, toleransi dan saling menghargai. Toleransi tidak hanya sekedar retorika, namun harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata. Di berbagai daerah di nusantara, hubungan umat beragama telah lama terjalin dengan harmonis dan toleran. Bahkan budaya gotong royong yang begitu kuat di masyarakat telah mampu merajut tali toleransi.⁴ Ini dibuktikan dengan adanya bantuan umat Kristen ketika umat Islam membangun masjid. Demikian pula ketika umat Kristen membangun gereja, ada bantuan dari umat Islam. Sungguh indah tali toleransi umat beragama di nusantara dengan munculnya budaya gotong royong, saling asih dan asuh antara kelompok yang berbeda agama.

Wilayah nusantara dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya adalah merupakan tempat tinggal yang aman, sejuk, dan damai bagi setiap warga negara. Masyarakat Indonesia yang plural baik dari segi suku, agama, bahasa, dan budaya tidaklah menjadi penghalang untuk beraktivitas di wilayah mana pun. Adanya kekayaan khazanah budaya bangsa yang harus dipelelihara dengan baik. Pluralitas masyarakat Indonesia bukanlah menjadi penghalang dan menjadi potensi konflik manakala perbedaan tersebut bisa dikelola dengan baik. Semua komponen masyarakat mendambakan kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan yang

⁴Burhanuddin Yahya, *Kerukunan dan Toleransi di Tengah Pluratis Bangsa* (Yayasan Ilmu, Jakarta:2017), 59

ada.⁵

Namun setelah Indonesia merdeka 70 tahun ternyata masih ada potensi-potensi konflik yang mengusik kerukunan di tengah masyarakat. Intoleransi antar umat beragama dan antaretnis yang berbeda, masih terus terjadi di berbagai daerah karena berbagai alasan. Bahkan intoleransi tersebut sampai pada kebencian yang mendalam dan bahkan sampai pada perusakan tempat ibadah. Konflik umat beragama yang terjadi di Tanjung Balai (Sumatera Utara) dan daerah-daerah lain menjadi catatan buram dalam usaha memperkokoh toleransi di tanah air.⁶

Kasus Tanjung Balai yang terjadi pada tahun 2016 dengan terjadinya perusakan tempat ibadah (Vihara), karena protes dan keluhan Meiliana (umat Budha) pada suara azan menjadi catatan penting dalam kajian dakwah dan sejarah toleransi di tanah air. Hakim telah menjatuhkan vonis 18 bulan penjara pada Meiliana karena ia mengeluhkan suara azan. Kasus ini menarik diteliti karena menimbulkan pendapat yang pro dan kontra di tengah masyarakat terkait suara azan yang dianggap mengganggu dan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan protes pada suara azan.

Kondisi masyarakat Tanjung Balai (Sumatera Utara) yang plural dari aspek agama dan etnis sangat sensitif setiap ada persoalan yang menyangkut agama. Di daerah ini umat Islam tergolong kelompok mayoritas, sedang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha tergolong kelompok minoritas. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan bisa menyejukkan bagi semua lapisan masyarakat agar esensi Pancasila dalam kebebasan menjalankan agama bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai muncul ujaran kebencian, fitnah dan penistaan agama karena alasan ketidaksukaan pada agama tertentu.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang pluralitas keagamaan secara umum, dan kehidupan keberagaman khususnya di Sumatera Utara telah banyak dilakukan oleh peneliti

⁵ Kodiran, *Pluralitas dan Kekayaan Kazanah Budaya Indonesia* (Rosdakarya, Bandung: 2016), 86.

⁶ Harian Kompas edisi 21 Juli 2017.

terdahulu. Tentu penelitian tersebut antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan, baik dari fokus kajian, analisis, dan sudut pandang yang diberikan. Penelitian yang akan dilakukan ini pun memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu, terutama pada aspek subyek penelitian, metode pengumpulan data dan juga analisis yang dilakukan. Penelitian ini terfokus kepada penelusuran atas kasus pemolisian kasus azan yang menimpa Meilina dan mengapa hal tersebut dapat terjadi serta nilai-nilai yang dapat diambil dari kasus tersebut untuk dijadikan sebagai beberapa rekomendasi dalam perancangan kebijakan multikultur di level pemerintahan.

Penelitian Syamsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi yang berjudul *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Karya ini merupakan penelitian komprehensif terkait berbagai macam konflik keagamaan yang berujung pemolisian. Karya tersebut memotret delapan kasus konflik keagamaan yang mencakup kasus sektarian dan penghancuran rumah ibadah. Karya tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam konteks pemolisian konflik keagamaan. Perbedaannya terletak di dalam obyek material penelitian serta dalam hal kajian atas kebijakan multikultural sebagai rekomendasi untuk rumusan regulasi.⁷

Penelitian karya Haidar Fahmi⁸ yang berjudul, *Problematika Pluralitas dalam mewujudkan Kerukunan di Ambon* juga memiliki relevansi dalam kajian ini. Penelitian yang fokus pada persoalan konflik Ambon yang pernah menjadi kasus nasional dengan terkejutnya masyarakat Ambon pada konflik berdarah karena perbedaan agama ini merupakan salah satu penelitian penting dalam konteks relasi antar agama di Indonesia. Karya penting lainnya adalah artikel jurnal karya Glant William berjudul *Analisa Manajemen dan Resolusi Konflik Agama: Studi Kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi Tahun*

⁷ Syamsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014).

⁸ Haidar Fahmi, "Problematika Pluralitas dalam Mewujudkan Kerukunan di Ambon, *Tesis Magister*, Universitas Gadjah Mada, 2013.

2010-2014.⁹ Di dalamnya dijelaskan pola yang terjadi dalam konflik HKBP di Bekasi yang berlangsung lama dan upaya perumusan resolusi konflik yang diharapkan dapat meredam perselisihan tersebut.

Karya ilmiah selanjutnya adalah penelitian Zainuddin yang berjudul *Peluang dan Tantangan Masyarakat Transmigrasi di Daerah Sumatera Utara ditinjau dari kajian Budaya*.¹⁰ Fokus dalam meneliti masyarakat di Sumatera Utara, penelitian ini memotret komunikasi budaya antara transmigran dari Jawa dengan penduduk setempat yakni masyarakat Batak yang telah lebih dahulu tinggal di sana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mereka mampu membangun komunikasi yang baik sehingga suasana kerukunan dapat terwujud. Relevansi penelitian Zainudin dengan penelitian ini adalah dalam hal obyek material yang meneliti masyarakat Sumatera Utara dengan perspektif yang berbeda. Penelitian lainnya yang fokus dalam masyarakat Sumatera Utara adalah karya Siti Halimah¹¹ yang berjudul *Problematika Perbedaan Agama dan Budaya dalam Membina Rumah Tangga Sejahtera/studi kasus di Medan, Sumatera Utara*.¹² Penelitian ini fokus pada persoalan rumah tangga yang berbeda agama dan budaya dan berbagai problematika yang timbul di tengah keluarga tersebut.

Berdasarkan penelusuran atas beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait tema relasi antar umat beragama yang spesifik memotret kasus pemolisian kasus azan yang menimpa Meilina Lestari merupakan sebuah upaya yang baru dilakukan dan tidak tercantum dalam penelitian sebelumnya. Dalam konteks inilah penelitian ini mendapatkan posisi strategis dalam wacana relasi umat beragama di Indonesia khususnya dalam konteks Sumatera Utara.

⁹ Glant William, "Analisa Manajemen dan Resolusi Konflik Agama: Studi Kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi Tahun 2010-2014", *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, Vol. 3, No. 3 (2005).

¹⁰ Zainuddin, "Peluang dan Tantangan Masyarakat Transmigrasi di Daerah Sumatera Utara ditinjau dari kajian Budaya", *Tesis Magister*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

¹¹ Siti Halimah, "Problematika Perbedaan Agama dan Budaya dalam Membina Rumah Tangga Sejahtera", *Tesis*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016.

¹² Siti Halimah, "Problematika Perbedaan Agama dan Budaya dalam Membina Rumah Tangga Sejahtera/studi kasus di Medan, Sumatera Utara", *Laporan Penelitian*, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013.

C. Kerangka Teoritik

Penelitian terkait model kebijakan multikultur dalam membangun harmoni antar umat beragama di masyarakat yang plural membutuhkan sebuah kerangka analisis yang terdiri dari sebuah kerangka teoretis. Kerangka utama dalam penelitian ini adalah penelusuran atas kasus pemolisian Meiliana terkait kasus azan yang menyimpannya. *Output* yang diharapkan adalah sebuah upaya dalam merumuskan beberapa rekomendasi untuk diejawantahkan dalam regulasi berupa kebijakan.

Dalam meneluri kasus pemolisian, riset ini memakai kerangka yang diterapkan oleh Syamsu Rizal Panggabean terkait tiga variabel utama dalam variasi konflik keagamaan. *Perama*, variabel struktural, berupa kerangka legal-prosedural yang menjadi pedoman polisi, karakter organisasi polisi setempat, sumberdaya, budaya pemolisian, politik lokal, dan termasuk juga di dalamnya tekanan opini publik. *Kedua*, variabel pengetahuan, yakni terkait dengan wawasan polisi terhadap kerangka legal-prosedural, pemahaman terhadap isu-isu konflik, dan pandangan terkait situasi konflik. *Ketiga*, variabel interaksi berupa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai di satu sisi dan antara pihak yang bertikai dengan polisi di sisi lainnya.¹³

Adapun dalam merumuskan sebuah kebijakan, diperlukan beberapa instrumen teoretis untuk menghasilkan suatu *output* yang dapat menjadi bahan kebijakan tersebut. Secara teoritik, esensi utama dari sebuah kebijakan adalah berupa strategi yang digunakan oleh pemangku kebijakan sebagai pedoman dalam mengambil langkah yang tepat untuk mencapai target yang dikehendaki. Pemangku kebijakan yang baik akan senantiasa memiliki karakter yang *open-mihnded* atau terbuka terhadap pandangan orang lain. Hal ini dilakukan untuk pengkayaan wawasan dan horison sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan memiliki kualitas dan dapat mencapai hasil yang maksimal.¹⁴ Pemangku kebijakan senantiasa mengharapkan hasil yang terbaik dalam setiap kebijakan yang dirancang. Menurut Jamaluddin Nasution, dalam membuat kebijakan seorang manajer atau tokoh

¹³ Syamsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, 1-2.

¹⁴ Wahyudi, *Strategi Kebijakan* (Jakarta: Gramedia, 2017), 147

minimal harus mempertimbangkan peluang yang ada, kondisi SDM yang dimiliki, membuat target jangka pendek, menengah dan jangka panjang.¹⁵

Selain itu, perpektif budaya dengan paradigma multikulturalisme juga menjadi wawasan tersendiri dalam membangun kebijakan multikultur. Kebudayaan sendiri pada dasarnya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Ia merupakan khas manusia. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkait.¹⁶

Raymond Williams menjelaskan adanya ada tiga arus dalam penggunaan istilah budaya, yaitu: *pertama*, yang mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat. *Kedua*, yang mencoba memetakan khazanah kegiatan intelektual dan artistik sekaligus produk-produk yang dihasilkan (film, benda-benda seni, teater). Dalam penggunaan ini, budaya kerap diidentikkan dengan istilah “kesenian”. *Ketiga*, untuk menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok atau masyarakat.¹⁷

Perspektif yang dibangun dalam penelitian ini juga mengarah kepada kerukunan Multikultur. Multikultural merupakan istilah yang memerlukan penjelasan teoritis tentang bagaimana suatu kehidupan yang rukun dalam suatu masyarakat majemuk dapat terwujud. Kalangan ilmuan sosial mengajukan beberapa pandangan sebagai berikut. Menurut Gerald A. Arbuckle, kehidupan multikultural bukan merupakan suatu perintah melainkan tumbuh dari kesadaran. Dalam definisi tersebut Arbuckle juga menolak adanya anggapan bahwa multikulturalisme merupakan penemuan dari beberapa orang ahli. Dua hal yang ditolaknya, perintah dan ide beberapa ilmuwan, mengakibatkan pandangan bahwa multikulturalisme merupakan gerakan dari bawah (*bottom-up*) dan melibatkan

¹⁵ Jamaluddin Nasution, *Manajemen Kebijakan Publik* (Jakarta: Titian Ilmu, 2016), 93-94.

¹⁶ Mudji Sutrisno (ed), *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, (Yogyakarta: Koekoesan, 2017), 66.

¹⁷ Raymond Williams, *Cultural Theory: An Introduction*, (Oxford-UK: Blackwell Publishers, 2011), 2

semua lapisan masyarakat. Di mata Arbuckle, multikulturalisme dengan demikian merupakan bentuk inkulturasi karena budaya dengan cepat berubah sendiri dan membentuk sesuatu yang baru. Perubahan terjadi karena keterlibatan semua komponen dalam struktur yang berperan, sehingga bentuk kehidupan multikultural terwujud.¹⁸

John Rex membedakan tiga pendekatan bertolak dari pandangan ruang public dan ruang privat sebagai model bagi bentuk masyarakat multicultural. Model pertama adalah adanya pembagian dalam kehidupan sosial antara ruang public (*public domain*) dan ruang pribadi (*private domain*). Pada ruang public, anggota masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan dan diterima bersama. Sementara di ruang pribadi masing-masing individu bisa mengekspresikan pandangannya sendiri dan menganut nilai-nilainya sendiri atau kelompoknya yang homogen.¹⁹

Model kedua adalah suatu bentuk kesamaan nilai di ruang publik dan di ruang privat. Nilai-nilai moral dan budaya yang digunakan ditentukan dan disepakati bersama untuk dijadikan sebagai pedoman tingkahlaku dan berinteraksi. Dengan demikian bentuk hubungan sosial budaya yang terjalin menunjukkan homogenitas dan tidak terdapat heterogenitas. Kesamaan dengan bertumpu pada suatu nilai yang dominan digunakan sebagai pengikat dalam mengatur kehidupan bersama.²⁰

Model ketiga, John Rex mengajukan model yang ditandai dengan adanya kebebasan luas untuk mengekspresikan dan menganut nilai budaya masing-masing baik pada bidang privat maupun bidang public, sehingga terbentuk suatu kondisi

¹⁸ Gerald A. Arbuckle, "Multiculturalism, Internationality, and Religious Life", dalam *Review for Religious*, Vol. 54, Mei-Juni 1995, 327-328.

¹⁹Teori ini sering dikenal sebagai *two domain thesis* dan pertama kali diterapkan pada wilayah persemakmuran (*commonwealth*) Inggris. Yunas Samad, "The plural guises of multiculturalism; conceptualizing a fragmented paradigm", dalam Tariq Modood and Pnina Werbner, *The Politics of Multiculturalism in the new Europe: racism, identity and community* (London, 1997, Zed Books), 253.

²⁰John Rex, "Multicultural and Plural Societies", dalam Montserrat Guiberneau and John Rex, *The Ethnicity Reader* (London, 1997, Polity Press), halaman 210. Dalam hal ini, Rex melihat adanya budaya asli dan budaya imigran yang hidup bersama. Tentu saja antara keduanya tidak mungkin disatukan mengingat latar belakang budaya yang berbeda. Untuk mencapai keharmonisan, antara keduanya harus dibuat kesamaan nilai sehingga antara kedua kelompok bisa saling menerima. Peter van de Veer, *Nation and Migration: the politics of space in the South Asia diaspora* (Pennsylvania, 1995, Univ. of Pennsylvania press.), 147.

pluralitas. Ikatan yang membentuk kesatuan dari model masyarakat ini adalah adanya sikap saling menerima dan saling menghargai. Bentuk atau model masyarakat ini menurut Rex disebut sebagai *egalitarian Multiculturalism*.²¹

Tiga model yang ditawarkan oleh Rex sebagai bentuk kerangka teoritis bagi masyarakat multicultural dan memiliki penerapan sendiri-sendiri di masyarakat dan bangsa. Model pertama adalah merupakan bentuk multicultural yang ideal karena tidak menghilangkan perbedaan ataupun menyamakan perbedaan. Pada model pertama ini ada ikatan atau nilai bersama di ruang public tetapi tetap ada kebebasan menganut nilai sendiri di ruang privat atau di komunitas masing-masing. Semua kelompok dapat menyumbangkan nilai sebagai pedoman atau dasar bagi kehidupan bersama. Model ini ideal diterapkan di Indonesia karena makna yang kurang lebih sama dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Produk ini menampakkan adanya pandangan keseragaman di atas keberagaman dalam kehidupan multikultur.

Pandangan konseptual dan teoritis di atas akan membantu mengarahkan dan mempertajam analisis atas sintesa fakta dan rekonstruksinya. Selain untuk menganalisis fakta, teori tersebut dapat menjadi peta jalan bagi terwujudnya kerukunan masyarakat yang kuat, tetapi dengan catatan penggunaan teori tidak bersifat parsial. Untuk itu, menurut pandangan sementara, teori yang diperlukan adalah multicultural konfrehensif, yakni adanya kesadaran dan penerimaan berbeda, aspek nilai (catur norma) yang mengatur, penghargaan perbedaan di ruang privat dan public, pelibatan segenap unsur secara sadar dan *bottom up* dalam proses penciptaan nilai dan penarapannya, dan upaya pemupukan kepercayaan secara terus menerus. Bangunan teori konfrehensif dimaksud sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

B. Demografi dan Potret Kerukunan di Tanjung Balai

Secara demografis Tanjung Balai yang luas wilayahnya 60, 52 km, memiliki penduduk yang tergolong plural baik dari aspek agama maupun etnis (suku). Kota

²¹Dalam kajian Rex, bidang public hendaknya terbuka bagi semua kesamaan istilah budaya dari masing-masing unturnya, sementara masing-masing komponen dalam masyarakat memberlakukan nilai-nilai budayanya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Richard Jenkins, “The place of theory: John Rex’s contribution to the Sociological study of ethnicity and race”, dalam Tahir Abbas and Frank Reeves, 2007, 10.

Tanjung Balai yang lokasinya berada di tepi sungai Asahan tergolong strategis sebagai kota perdagangan. Sejak dahulu daerah ini menjadi pusat perdagangan karena lokasinya dekat dengan laut. Jarak dari kota Medan ke Tanjung Balai sekitar 186 Km, atau sekitar 5 jam perjalanan dengan naik kereta api. Dari data Kementerian Agama Tanjung Balai, mayoritas penduduk Tanjung Balai menganut agama Islam (85,14 %), baru disusul oleh Kristen Protestan (8,11 %), Budha (5,70 %), Katholik (1,01 %), Hindu (0,02), dan Konghucu (0,02 %). Selanjutnya dari aspek etnis (suku) yang ada di Tanjung Balai, mayoritas dari suku Melayu, disusul, Batak, Jawa, Tionghoa, dan India.²²Berikut tabel data agama penduduk Tanjung Balai:

TABEL 1
DATA PORSENTASE AGAMA PENDUDUK TANJUNG BALAI
TAHUN 2019

| NO | AGAMA | PORSENTASE (%) |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | ISLAM | 85,14 |
| 2 | KRISTEN PROTESTAN | 08,11 |
| 3 | BUDHA | 05,70 |
| 4 | KATHOLIK | 01,01 |
| 5 | HINDU | 00,02 |
| 6 | KONGHUCU | 00,02 |
| | JUMLAH | 100,00 |

Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Tanjung Balai tahun 2019

Dari data penduduk tahun 2019, penduduk Tanjung Balai berjumlah 169.627 jiwa, dengan komposisi pria 84.476 jiwa dan perempuan 85.151 jiwa. Kota Tanjung Balai tergolong daerah kecil karena hanya terdiri dari 6 kecamatan, dan sebaran penduduknya di enam kecamatan tersebut tergolong merata. Kecamatan Teluknibung tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya (35.802 jiwa), disusul kecamatan Datuk Bandar (33.979 jiwa), kecamatan Datuk Bandar Timur (26.942 jiwa), Sei Tualang Raso (22.712 jiwa), Tanjung Balai Selatan (19.330 jiwa), Tanjung Balai Utara (15.862

²² Dokumentasi Tanjung Balai tahun 2019

jiwa). Saat ini (2019) kota Tanjung Balai dipimpin oleh wali kota H. Muhammad Syahrial, SH, dan wakil wali kota Drs. H. Ismail. Kedua pimpinan daerah ini diusung oleh PDI P dan Golkar.²³

Berikut ini data sebaran penduduk penduduk Tanjung Balai di masing-masing Kecamatan:

TABEL 2
DATA SEBARAN PENDUDUK TANJUNG BALAI TAHUN 2019

| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|---------|
| 1 | Teluknibung | 40.802 |
| 2 | Datuk Bandar | 38.979 |
| 3 | Datuk Bandar Timur | 28.942 |
| 4 | Sei Tualang Raso | 23.712 |
| 5 | Tanjung Balai Selatan | 20.330 |
| 6 | Tanjung Balai Utara | 16.862 |
| | Jumlah | 169.627 |

Sumber: dokumentasi Penduduk Tanjung Balai tahun 2019

Dari aspek pendidikan, masyarakat Tanjung Balai tergolong memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Rata-rata penduduknya yang sudah berusia 20 tahun ke atas sudah lulus SLTA. Di daerah ini ada tingkat Pendidikan dari PAUD/TK hingga Perguruan Tinggi swasta. Selain pendidikan yang dikelola oleh pemerintah (sekolha negeri) dari SD hingga SLTA, juga ada lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Berbgai ormas keagamaan juga ikut andil dalam mengelola pendidikan di daerah ini, seperti al Wasliyah, Muhammadiyah, NU, dan juga yayasan Kristen. Pendidikan yang tergolong maju di daerah ini karena dukungan masyarakat dan juga motivasi masyarakat Tanjung Balai yang ingin maju dan memiliki perhatian yang cukup baik pada pendidikan.

Demikian pula dari aspek agama, masyarakat Tanjung Balai tergolong religius, karena ketaatan mereka menjalankan agama. Wawasan keagamaan masyarakat, khususnya masyarakat Islam sudah sejak dini ditanamkan pada

²³ Dokumentasi Tanjung Balai tahun 2019

anak-anak. Penanaman wawasan keislaman tersebut diberikan orang tua pada anaknya melalui pendidikan formal dan juga non formal. Di berbagai masjid dan mushalla ada bimbingan belajar agama bagi anak-anak. Kegiatan ini biasanya dilakukan sore hari dan sehabis maghrib. Selain itu juga ada pengajian yang dilakukan oleh ustad di rumah ustad khusus untuk belajar membaca al Qur'an bagi anak-anak di lingkungan masing-masing. Pendidikan formal dalam bidang keislaman juga ada di daerah ini, seperti pesantren, madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah, aliyah, dan Perguruan Tinggi Islam.²⁴

Penanaman wawasan keislaman yang cukup baik di daerah ini membuat masyarakat Tanjung Balai tergolong masyarakat yang religius dan bisa saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Berbagai lembaga keislaman yang ada di daerah ini, mulai dari majelis taklim, pendidikan pesantren, kegiatan TPA di masjid hingga ceramah-ceramah keagamaan bakda subuh memiliki peran penting dalam membentuk wawasan keislaman masyarakat. Gambaran keagamaan masyarakat Tanjung Balai tersebut menjadi modal penting dalam penguatan kerukunan beragama di daerah ini. Toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat menjadi komitmen bersama yang menjadi tanggung jawab bersama.

Sering dengan wawasan keagamaan masyarakat yang sudah baik, membuat mereka tidak mudah terprovokasi. Mereka juga melakukan dialog antar tokoh agama secara kontiniu sebagai media komunikasi untuk mencegah munculnya berbagai kecurigaan dan potensi-potensi konflik di tengah masyarakat. Peran ormas-ormas keagamaan di daerah ini sangat penting untuk penguatan toleransi dan kerukunan. Masing-masing tokoh ormas keagamaan memiliki komitmen yang sama untuk membangun dialog yang lebih aktif dan kontiniu, sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh agama tersalurkan dengan baik.

Munculnya tindakan *intoleransi* (tidak toleran) terhadap kelompok lain, karena perbedaan politik, keyakinan, etnis, budaya dan lain-lain, kini semakin marak di tengah masyarakat. Akibat dari tindakan intoleransi tersebut membuat munculnya suasana *disharmoni* (tidak harmonis), dan bahkan konflik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kasus perusakan rumah/tempat ibadah

²⁴ Observasi di Tanjung Balai, Juni, September dan Oktober 2019

(kelenteng) di Tanjung Balai (Sumut), karena kasus azan yang diprotes Meiliana menjadi catatan menarik dari praktik intoleransi di daerah ini.

Selama ini masyarakat Tanjung Balai bisa hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Islam sebagai agama mayoritas di daerah bisa menjaga kerukunan dengan umat agama lain yang minoritas. Di daerah Tanjung Balai, selain Islam sebagai agama mayoritas, masih ada agama lain seperti Kristen, Budha, Katholik, Hindu dan Konghucu. Masing-masing penganut agama bisa saling menghargai dan menjalin komunikasi yang baik, sehingga terwujud toleransi dan kerukunan yang cukup baik di daerah ini. Kata kunci terwujudnya kerukunan di Tanjung Balai adalah karena komunikasi yang baik dan kemaun saling menghargai di tengah perbedaan yang ada.²⁵

Ketika muncul rusuh Tanjung Balai tahun 2016 yang lalu, yang dipicu protes azan dari Meiliana (etnis Cina dan menganut Budha) sungguh sangat disayangkan. Suara azan dari masjid al Makshum kebetulan berdekatan dengan rumah Meiliana, sehingga ia merasa terganggu dengan volume azan tersebut. Protes yang awalnya tergolong biasa menjadi luar biasa karena beritanya sudah melebar dengan masuknya ujaran kebencian dan berita bohong. Akibat dari berita yang tak utuh lagi membuat massa marah dan emosi kepada Meiliana. Kasus ini akhirnya merusak toleransi dan kerukunan yang sudah lama terpelihara dengan baik. Masing-masing umat beragama sejatinya harus bisa menahan diri dan menghargai orang lain sebagai kata kunci penguatan kerukunan.²⁶

Kasus-kasus intoleransi di berbagai daerah perlu terus diwaspadai, karena awalnya kasusnya tergolong biasa, namun bisa menjadi prahara ketika sudah masuk unsur provokasi di dalamnya. Kasus-kasus yang menyangkut SARA, kalau tidak segera diatasi dengan baik, akan bisa menjadi “bom waktu” yang akan mengoyak semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Demikian pula dengan paham teroris yang dalam perjuangannya sering mengatasnamakan agama, dan menafsirkan makna “jihad” dengan sempit dan subyektif, menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat. Padahal sejatinya nilai-nilai

²⁵ Wawancara dengan Roduan Siregar (wartawan di Tanjung Balai) tgl 18 Oktober 2019

²⁶ Wawancara dengan Roduan Siregar (wartawan di Tanjung Balai) tgl. 18 Oktober 2019

Islam memiliki komitmen yang tinggi pada kerukunan, toleransi dan kehidupan yang harmonis.

Sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik ini terkenal sangat toleran, santun, dan menghargai perbedaan yang ada. Kemauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan adalah merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat luhur. Masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya tidak akan terjebak pada konflik, karena bagi masyarakat yang berbudaya, perbedaan adalah suatu keindahan yang harus dipelihara dengan baik. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia. Manusia (masyarakat) dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu jalinan yang saling erat berkait. Kebudayaan tidak akan ada tanpa ada masyarakat dan tidak ada satu kelompok manusia pun, betapa terasing dan bersahajanya hidup mereka, yang tidak mempunyai kebudayaan. Semua kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan, karena manusia merupakan subyek budaya. Yang berbeda hanyalah tingkat dan taraf kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Kalau dikaji ajaran masing-masing agama, sesungguhnya setiap agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu) mengajarkan tentang kerukunan. Tidak satu pun agama yang mengajarkan konflik. Namun dalam praktiknya konflik internal dan antarumat beragama terkadang tidak bisa dihindari. Konflik itu bisa terjadi karena emosi umat yang tak terkendali. Untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama, perlu terus ditingkatkan pembinaan kehidupan umat beragama oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama.

Potret kerukunan umat beragama di Tanjung Balai sesungguhnya sesuai dengan karakter masyarakat Melayu sebagai kelompok etnis yang dominan di daerah ini. Masyarakat Melayu terkenal ramah, jujur dan bersahabat dengan orang lain. Selain tradisi mereka yang ramah, masyarakat Melayu Tanjung Balai juga terkenal religius (taat menjalankan ajaran Islam). Dengan demikian karakter tersebut menjadi modal penting dalam usaha penguatan toleransi dan kerukunan di daerah ini. Demikian pula dengan suku Jawa dan Batak yang merupakan kelompok

masyarakat yang tergolong besar jumlah di daerah ini, memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan. Kekayaan khazanah budaya yang dimiliki setiap suku yang ada di Tanjung Balai menjadi perekat semakin kokohnya toleransi dan kerukunan.

C. Kebijakan Kerukunan Multikultur

Kebijakan kerukunan multikultural sudah merupakan kebijakan nasional yang digagas oleh pemerintah sejak tahun 1970 an. Ketika Prof . Mukti Ali memimpin Kementerian Agama tahun 1970 an, sudah dibuat kebijakan multikultural agar terwujud kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Dalam aspek agama, biasanya potensi-potensi konflik terjadi karena adanya kecurigaan dalam penyebaran agama, pembangunan tempat ibadah hingga munculnya ujaran kebencian dari kelompok agama yang berbeda. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan baik dari berbagai pihak agar terwujud kerukunan yang kokoh di tengah masyarakat. Berikut ini berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan bergama di daerah Tanjung Balai.

1. Kebijakan Melalui Dialog antar Tokoh Agama

Dialog antar tokoh agama yang sudah sejak lama digagas oleh pemerintah pusat juga dilaksanakan di daerah Tanjung Balai. Tokoh-tokoh agama yang ada di daerah Tanjung Balai memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya mewujudkan kerukunan di daerah ini. Salah satu cara memperkuat kerukunan umat beragama bisa dilakukan dengan adanya dialog antar tokoh agama, agar bisa saling memahami, menghargai dan bisa mencegah potensi-potensi konflik. Berikut ini pernyataan Habib Ritonga menjelaskan bahwa kebijakan kerukunan di Tanjung Balai sudah berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dengan adanya Forum kerukunan umat beragama yang rutin melakukan kegiatan dialog umat beragama. Tokoh-tokoh agama menjalin komunikasi, sehingga kalau ada potensi-potensi konflik bisa segera ditasi dan dicari solusi melalui komunikasi yang kontiniu antar tokoh agama.²⁷

Pernyataan Habib ini menjadi gambaran nyata bahwa sesungguhnya di

²⁷ Wawancara dengan Hadib Ritonga (Kemenag Tanjung Balai) tgl 7 September 2019

Tanjung Balai sudah berjalan dialog anatar tokoh-tokoh agama. Ini merupakan langkah maju untuk mencegah munculnya konflik agama. Dengan adanya dialog yang kontiniu antar tokoh agama membuat suasana damai dan toleran bisa terwujud, karena berbagai kecurigaan dan kebencian di tengah perbedaan bisa dicegah. Setiap tokoh agama yang serius melakukan dialog akan bisa memperkuat wawasan dan sekaligus mencegah panatisme berlebihan. Esensi dialog juga akan membuat seseorang bisa menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda. Biasanya tersumbatnya dialog antar tokoh agama karena adanya rasa ego yang berlebihan, dan memandang lawan dialog sebagai orang yang sesat. Kalau cara pandang berdialog sudah diarahkan sebagai mitra kerja untuk menjaga persatuan bangsa, maka bisa membuahkan hasil yang positif.

Pentingnya dialog antar tokoh agama untuk mewujudkan kerukunan yang kokoh di tengah masyarakat juga diakui oleh Sangkor Sirait. Menurut Sangkot, solusi terbaik dalam mencegah konflik di Tanjung Balai harus ada uasaha sungguh-sungguh dan kontiniu dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun dialog antara elemen masyarakat yang plural. Tidak hanya pada tokoh-tokoh agama saja, namun idealnya dialog perlu dilakukan sampai tingkat desa. Kalau tokoh-tokoh agama sampai tingkat desa sudah melakukan komunikasi secara rutin akan bisa mencegah ulah provokator dan akan terwujud kembali toleransi yang kokoh di daerah ini.²⁸

Aktualisasi dari dialog antar tokoh agama di Tanjung Balai sudah berjalan dengan rutin setiap tahun. Selain kegiatan dialog antar tokoh agama, menurut Habib Ritonga, Kemenag Tanjung Balai juga secara kontiniu memberi pembinaan dan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan oleh sampai ke pedesaan membuahkan hasil yang cukup positif dengan bertambahnya wawasan masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi.²⁹

2. Kebijakan Mencegah Berita Bohong

Idealnya media massa berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan

²⁸ Wawancara dengan Sangkot Sirait, di Yogyakarta tgl. 22 Agustus 2019

²⁹ Wawancara dengan Hadib Ritonga, di Tanjung Balai tgl. 19 Oktober 2019

masyarakat, manakala media massa tersebut dikelola dengan baik. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang jujur tentu sangat banyak manfaatnya. Namun manakala media massa dan media sosial digunakan untuk menyebar ujaran kebencian, fitnah dan hoaks, justru akan berdampak negatif bagi masyarakat. Selain dampak negatif bagi masyarakat, penyebaran berita bohong juga akannbisa berurusan dengan hukum karena UU ITE yang bisa menjerat setiap orang yang menyalah gunakan penggunaan media. Kasus Meiliana yang terjadi di Tanjung Balai karena protes pada volume azan, ada juga kaitannya dengan penyebaran berita bohong di media, sehingga menimbulkan rusuh. Ada berita yang sudah tidak utuh dari kasus Meiliana, sehingga mengundang kemarahan massa ke Mieliana. Berita bohong tersebut terkait dengan tidak utuhnya berita, yang awalnya Meiliana hanya menyampaikan keluhan biasa tentang volume suara azan yang dekatnya dengan rumahnya, menjadi berita yang menghebohkan di media sosial dengan menyebut dia sebagai penista agama.

Rusuh Tanjung Balai memang sangat disesalkan, dan kedepan diperlukan kehati-hatian dalam menyebarkan berita agar jangan sampai muncul berita bohong dan ujaran kevenbcian yang biasa berdampak negatif bagi masyarakat. Terkait dengan dampak negatif berita bohong ini, Kamaluddin Nasution memberi komentar berikut :

Kasus rusuh Tanjung Balai tahun 2016, ada kaitan dengan dampak penggunaan media sosial yang tak terkontrol dengan menyebarkan berita bohong/hoaks. Kasus adzan yang dikeluhkan meiliana begitu cepat beredar melalui media sosial, sehingga membuat berita tersebut tidak utuh lagi dan sudah dipelintir dengan ujaran kebencian kepada etnis Cina dan non muslim yang kebetulan memiliki ekonomi yang lebih maju dibanding dengan pribumi. Dengan penyebaran berita melalui media sosial tersebut membuat masyarakat menerima begitu saja informasi yang tidak akurat kebenarannya. Akibatnya muncul kemarahan massa yang menimbulkan kerusuhan di Tanjung Balai dengan tindakan merusak dan membakar Kelenteng yang menjadi tempat ibadah umat Budha.³⁰

Pernyataan yang disampaikan Kamaluddin tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus Meiliana, tidak bisa semata kesalahan dibebankan kepadanya, namun ada faktor penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dalam kasus tersebut.

³⁰ Wawancara dengan Kamaluddin Nasution (Guru MAN 1 Tanjung Balai) tgl. 7 September 2019

Berita yang mengatakan Meiliana menista agama tergolong berlebihan (bohong), karena yang ia lakukan hanya sebatas protes volume suara azan. Protes tersebut tergolong wajar karena ia masih mempunyai anak kecil dan terganggu dengan suara azan subuh ketika anak masih pulas tidur. Seharusnya protes tersebut disikapi dengan pikiran jernih saja tanpa ada unsur kebencian dengan orang lain yang berbeda agama. Ketika berita disebar dengan kata-kata penistaan agama tentu sangat berbahaya.

Kalangan wartawan juga merasakan banyak dampak negatif penggunaan media sosial akhir-akhir ini dengan maraknya berita bohong. Ketika setiap pengguna media sosial berperan sebagai wartawan dan berita yang disebar tidak melalui koreksi yang ketat, tentu sangat berpeluang muncul berita bohong. Lebih lanjut Roduan Siregar, seorang wartawan di Tanjung Balai memberi komentar sebagai berikut:

Dari pandangan wartawan, rusuh yang terjadi di Tanjung Balai beberapa waktu lalu karena kasus azan di Masjid al Makshum adalah karena faktor berita bohong (hoaks). Ketika setiap orang berperan sebagai wartawan tanpa ada seleksi, karena hampir setiap orang memiliki media sosial (HP), maka begitu mudah menyebarkan berita yang tidak melalui proses seleksi. Setiap orang begitu mudah menyebarkan berita bahkan berita bohong sekali pun mudah disebar. Demikian pula dengan kasus rusuh di Tanjung Balai tahun 2016 yang lalu adalah karena berita bohong yang disebar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Berita yang sudah "digoreng" dan mengandung provokasi yang bernuansa SARA begitu mudah menyebar dan membakar emosi masyarakat. Padahal kalau dibicarakan baik-baik, sesungguhnya kasus Meiliana yang memprotes azan itu berawal dari persoalan biasa yang sudah digoreng dengan unsur SARA, sehingga menimbulkan prahara di daerah ini.³¹

Penyebaran berita yang seharusnya untuk mencerdaskan masyarakat akan bisa berubah menjadi menyesatkan manakala berita tersebut mengandung unsur bohong dan ujaran kebencian. Untuk itu perlu pencegahan berita bohong agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Salah satu mencegah maraknya berita bohong bisa melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh para juru dakwah di masyarakat, bahwa melakukan penyebaran berita bohong bertentangan dengan nilai-nilai agama. Setiap orang hendaknya harus memiliki komitmen yang kuat pada nilai kejujuran dalam menyebarkan berita, sehingga tidak menimbulkan

³¹ Wawancara dengan Roduan Siregar (wartawan Waspada cabang Tanjung Balai) tgl. 6 September 2019

petaka pada orang lain. Karena dampak negatif dari penyebaran berita bohong sangat merugikan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang Kebijakan Kerukunan Multikultur dalam Merajut Toleransi Umat Beragama, dari kasus azan yang menjadikan Meiliana tersangka cukup menarik dan banyak pelajaran yang bisa diambil untuk penguatan kerukunan umat beragama. Perlu saling memahami dan menghargai di tengah perbedaan yang ada agar terwujud toleransi dan kerukunan yang kokoh. Ada tiga kesimpulan penting yang perlu disampaikan dalam penelitian ini.

1. Aktifitas dakwah dan penguatan kerukunan umat beragama yang dilaksanakan di Tanjung Balai selama ini tergolong berjalan dengan baik. Juru dakwah memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kerukunan melalui pesan-pesan dakwah yang mereka lakukan di masyarakat. Ormas-ormas keagamaan yang ada di Tanjung Balai juga berusaha keras memelihara kerukunan dengan melakukan dialog agama tokoh agama secara kontiniu sebagai media komunikasi menyamakan persepsi dan menghindari berbagai kecurigaan di tengah perbedaan yang ada.
2. Diskripsi kasus pemolisian Meiliana berawal dari kasus biasa dengan ada nya protes dari Meiliana pada volume suara azan subuh yang dirasa agak mengganggu bagi anak-anaknya yang masih kecil dan pada waktu tersebut anaknya masih pulas tidur. Persoalan biasa tersebut ternyata berkembang penyebaran beritanya melalui media sosial dan sudah “digoreng” dengan masuknya unsur kebencian. Dengan demikian berita yang tak utuh tersebut apalagi sudah menyangkurt unsur SARA membuat prahara. Masyarakat Tanju7ng Balai yang mayoritas muslim marah dan menyebut Meiliana melakukan tindakan penistaan agama. Akhirnya terjadi kerusuhan Tanjuung Balai dengan adanya perusakan pada Kelenteng, dan Meiliana pun dipolisikan dan diputus bersalah oleh hakim dengan hukuman 1,5 tahun penjara.
3. Kebijakan kerukunan multikultural sesungguhnya sudah menjadi kebijakan nasional yang dilakukan sudah dilakukan sejak lama. Walaupun berbagai

kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai dialog agama secara kontiniu, namun potensi konflik selalu ada di tengah masyarakat. Di Tanjung Balai juga sudah sejak lama ada kebijakan kerukunan yang dilakukan oleh pemerintah dan ormas keagamaan. Bahkan melalui lembaga pendidikan juga ikut andil dalam penguatan toleransi dan kerukunan di masyarakat. Kebijakan kerukunan yang dilakukan selama ini di Tanjung Balai, mulai dari dialog antar tokoh agama secara kontiniu, kebijakan penyampaian pesan-pesan dakwah yang berkomitmen pada kerukunan, hingga kebijakan melalui pendidikan dalam penguatan semangat nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Muhammad, *Radikalisme Agama-Agama Abad 21, dalam Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*, Bandung: Gunung Jati Press, 2016.
- Arifin Husein, *Media Massa dan Pencegahan Berita Bohong*, Jakarta: Lentera Ilmu, 2018
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016
- Burahanuddin Yahya, *Kerukunan dan Toleransi di Tengah Pluratis Bangsa*, Yayasan Ilmu, Jakarta:2017
- Dja'far H. Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, Bandung: Rosdakarya, 2009
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: LESFI, 2009
- Gerald A. Ardbuckle, "Multiculturalism, Internationality, and Religious Life", dalam *Review for Religious*, Vol. 54, Mei-Juni 1995
- Glant William, "Analisa Manajemen dan Resolusi Konflik Agama: Studi Kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi Tahun 2010-2014", *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, Vol. 3, No. 3 tahun 2005
- Haidar Fahmi, "Problematika Pluralitas dalam Mewujudkan Kerukunan di Ambon, *Tesis Magister*, Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, Yogyakarta: LESFI, 2016
- , *Pasang Surut Dakwah Dalam Dinamika Budaya, Politik dan Keluarga*, Yogyakarta: Yayasan Fokus, 2009
- Jamaluddin Nasution, *Manajemen Kebijakan Publik*, Jakarta: Titian Ilmu, 2016
- Johan Effendi, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan," dalam *PRISMA*, No. 5, Juni 1998, Jakarta: LP3ES
- John Rex, "Multicultural and Plural Societies", dalam Montserrat Guiberneau and John Rex, *The Ethnicity Reader* (London, Polity Press, 1997

- Kodiran, *Pluralitas dan Kekayaan Kazanah Budaya Indonesia*, Rosdakarya, Bandung: 2016
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015
- Mudji Sutrisno (ed), *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, Yogyakarta: Koekoesan, 2017
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Peter van de Veer, *Nation and Migration: the politics of space in the South Asia diaspora* (Pennsylvania, Univ. of Pennsylvania press, 1995
- Raymond Williams, *Cultural Theory: An Introduction*, Oxford-UK: Blackwell Publishers, 2011
- Richard Jenkins, "The place of theory: John Rex's contribution to the Sociological study of ethnicity and race", dalam Tahir Abbas and Frank Reeves, 2007
- Rosihan Anwar, *Wartawan dan Bahasa Jurnalistik*, Jakarta: Titian Ilmu, 2011
- Sayyed Hossein Nashr, *Islam Cita dan Islam Fakta*, Jakarta: Yayasan Obor, 1984
- Siti Halimah, "Problematika Perbedaan Agama dan Budaya dalam Membina Rumah Tangga Sejahtera", *Tesis*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016
- Syamsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta, PUSAD Paramadina, 2014
- Wahyudi, *Strategi Kebijakan*, Jakarta: Gramedia, 2017
- Yunas Samad, "The plural guises of multiculturalism; conceptualizing a fragmented paradigm", dalam Tariq Modood and Pnina Werbner, *The Politics of Multiculturalism in the new Europe: racism, identity and community*, London, 1997
- Zainuddin, "Peluang dan Tantangan Masyarakat Transmigrasi di Daerah Sumatera Utara ditinjau dari kajian Budaya", *Tesis Magister*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014